

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik pemberian *Böwö* dalam perkawinan adat masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, khususnya dampaknya terhadap kedudukan hukum perempuan dan janda dalam sistem kekerabatan patrilineal. Perkawinan adat di wilayah ini masih menempatkan *Böwö* sebagai syarat fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu hubungan menurut adat, meskipun perkawinan tersebut telah memenuhi syarat agama dan negara. Dalam konteks hukum nasional, kondisi ini menimbulkan persoalan perlindungan hukum karena menempatkan adat sebagai penentu status sosial perkawinan, sekaligus menciptakan dualisme keabsahan. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan adat mengenai *Böwö* tidak tertulis, berubah-ubah, dan sangat bergantung pada keputusan tokoh adat, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang ketidakadilan, terutama bagi perempuan dan janda.

Problematika semakin kompleks pada perkawinan kedua, karena keberadaan praktik *Fanaligana'a* (tebusan adat bagi janda) menempatkan perempuan sebagai objek genealogis yang harus “dilepaskan” dari keluarga suami pertama. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan beban ekonomi, tetapi juga membatasi hak perempuan untuk menikah kembali, bertentangan dengan prinsip persamaan, non-diskriminasi, dan hak atas martabat manusia sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, UU Perkawinan, dan instrumen HAM. Melalui pendekatan empiris dan teori Keadilan Bermartabat, penelitian ini menawarkan konsep rekonstruksi *Böwö* yang berbasis nilai kemanusiaan, yakni mengembalikan fungsi *Böwö* sebagai simbol penghormatan antar keluarga, memberlakukan *Böwö* dengan tidak mengurangi hak-hak perempuan karena hak-hak yang melekat dalam diri perempuan adalah hak asasi manusia, serta menstandarkan besaran *Böwö* agar lebih proporsional. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Desa/Perda Adat sebagai instrumen harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan dan janda, sekaligus menjaga keberlanjutan nilai budaya masyarakat.

Kata Kunci: *Böwö*, Perkawinan Adat, Janda, Keadilan Bermartabat.

ABSTRACT

This study examines the practice of giving B \ddot{o} w \ddot{o} in traditional marriages in the Pulau-Pulau Batu District, South Nias Regency, particularly its impact on the legal status of women and widows in the patrilineal kinship system. Traditional marriages in this region still place B \ddot{o} w \ddot{o} as a fundamental requirement that determines the validity of a relationship according to custom, even though the marriage has fulfilled religious and state requirements. In the context of national law, this condition raises legal protection issues because it places custom as the determinant of the social status of marriage, while simultaneously creating a dualism of legitimacy. This study found that customary provisions regarding B \ddot{o} w \ddot{o} are unwritten, changeable, and highly dependent on the decisions of traditional leaders, thus creating legal uncertainty and opening up space for injustice, especially for women and widows. The problem becomes more complex in second marriages, because the existence of the practice of Fanaligana'a (customary ransom for widows) places women as genealogical objects that must be "released" from the first husband's family. This condition not only creates an economic burden, but also limits women's right to remarriage, contradicting the principles of equality, non-discrimination, and the right to human dignity as guaranteed by the 1945 Constitution, the Marriage Law, and human rights instruments. Through an empirical approach and the theory of Dignified Justice, this study offers a concept of B \ddot{o} w \ddot{o} reconstruction based on humanitarian values, namely restoring the function of B \ddot{o} w \ddot{o} as a symbol of respect between families, implementing B \ddot{o} w \ddot{o} without reducing women's rights because the rights inherent in women are human rights, and standardizing the amount of B \ddot{o} w \ddot{o} to be more proportional. This study recommends the preparation of Village Regulations/Customary Regulations as an instrument of harmonization between customary law and state law to ensure better legal protection for women and widows, while maintaining the sustainability of community cultural values.

Keywords: *B \ddot{o} w \ddot{o} , customary marriage, widow, dignified justice.*